

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Syaifudin, Mahyuni, Ifrani. *Buku Ajar HUKUM PERTAMBANGAN (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Redi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.
- Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. *Kebijakan Mineral Dan Batubara Indonesia*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Dwi Haryadi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2018.
- Esmi Warasih. *Pranata Hukum*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- Fauzie Kamal Ismail. "Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan." Universitas Indonesia, 2011.
- Irwandy Arif. *Emas Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Muhamad Azhar. *BUKU AJAR HUKUM PERTAMBANGAN*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro, 2019.
- Nurhasanah Ismail. *Perkembangan Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *PENELITIAN HUKUM EDISI REVISI*. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011.
- Philipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Cetakan I. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sidharta. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Sri Nur Hari Susanto. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Yoga Pratama, 2020.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tjia Siau Jan. *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*. Cetakan I. Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2013.
- Vera Rimbawani Sushanty. *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press, 2020.

Jurnal

- Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol.4 No 2 (2021).
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No (2018): hlm 84-85.
- Anugrah Pratama Afin dan Berkah Fajar Tamtomo Kiono. "Potensi Energi Batubara Serta Pemanfaatan Dan Teknologinya Di Indonesia Tahun 2020-2050 : Gasifikasi Batubara." *JEBT: Jurnal Energi Baru & Terbarukan* Vol 2, No (2021): hlm 117.
- Arif Setia Sasmita, Herman Susetyo, Hendro Saptono. "Akibat Hukum Tindakan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peralihan Dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan." *Diponegoro Law Review* Volume 1, (2013): 5.
- Chintya Ainun Khasanah. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Belakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Ejournal.Unesa* Volume 01 (2021): hlm 5.
- Elli Ruslina. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 9, (2012): hlm 60.
- Erika. "Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Yuridis* Vol 5 No 1 (2018): hlm 120.
- Fadly Adrianto. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 3, no. issue 1 (2020): 116.
- Fence M. Wantu. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19 No (2007): hlm 388.
- Imam Sukadi. "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 12 (2020): hlm 183.
- Iskandar Wibawa. "Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mba Minah)." *Ejournal.an-Nawdah* Vol.8 No 1 (2017): 26.

- Iswadi Amiruddin, Muhammadiyah, Anwar Parawangi. "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka." *Journal Unismuh* Volume 1, (2020).
- M. Isnaeni. "Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* Vol 5 (1996): hlm 34.
- Maisara Sunge. "Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah." *Jurnal Inovasi* Volume 6, (2009): hlm 187.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* Volume 01, (2019).
- Muhamad Azhar. "Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, no. Issue 3 (2019): hlm 451.
- Muhamad Azhar. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara." *Notarius* Edisi 08, no. Nomor 2 (2015): hlm 274
- Nyoman Gede Remaja. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 2 No (2014): 2.
- Rachel Ocatvia Manurung, FC Susila Adiyanta, dan Henny Juliani. "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 5, no. Issue 2 (2022): hlm 136-137
- R. Tony Prayogo. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* VOL.13 NO. (2016).
- Rifqy Maulana dan Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan." *Jurnal Justisia* Vol 3, No (2018): hlm 90.
- Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-1* Vol 8 No 1 (2021): hlm192.
- Rizkyana Zaffrinda Putri dan Lita Tyesta A.L.W. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Law Reform* Volume 11, (2015): hlm 203.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16, (2020): hlm 88-100.
- Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni. "Hak Tanggungan Sebagai Lemabaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1996, hlm 34.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, no. Issue 3 (2019): hlm 546.

Sri Nur Hari Sussanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, no. Issue 1 (2019).

Sri Nur Hari Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 3, no. Issue 3 (2020): hlm 434.

Sri Nurhari Susanto. "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 4, no. Issue 1 (2021): hlm 148.

Sri Nur Hari Susanto. "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, no. Issue 2 (2019): hlm 208.

Sri Nur Hari Susanto. "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Administrative Law & Governance Journal* Volume 3, no. Issue 4 (2020): hlm 659.

Zen Lutfulloh dan Wahyu Donri. "Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Volume 47, (2021): hlm 179.

Zulkarnain Ridlwan. "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 N (2012): 148.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 (n.d.).

Undang - Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (n.d.).

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. "Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pendelegasian Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara." Jakarta, 2022.

Keputusan Presiden No 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (n.d.).

Skripsi

Anisa Deny Setiawati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI." Universitas Arilangga, 2015.

Arifin Ali Mustofa. "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Ega Fatmawati. "Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro." Universitas Diponegoro, 2013.

Muhammad Insan C. Pratama. "Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract." Universitas Islam Indonesia, 2009.

Riki Wisandi. "Tinjauan Terhadap Fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal KEMENDIKBUD Jakarta Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Di Bidang

Pendidikan Dasar Dan Menengah (Suatu Kajian Yuridis PERMENDIKBUD No 11. Tahun 2015).” Universitas Diponegoro, 2017.

Siti Khoirotul Ula. “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Maslamam ’ Ammah.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Website

Aji Prasetyo. “Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Izin Tambang Dicabut.” *Hukumonline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-hukum-izin-tambang-dicabut-lt61d9529115164/>.

Aryo Bhawono. “Pemerintah Cabut 2.065 Izin Pertambangan.” *Betahita.Id*, 2022. <https://betahita.id/news/detail/7870/pemerintah-cabut-2-065-izin-pertambangan.html?v=1660356173>.

Bagian Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Cabut Ribuan IUP, HGU, Dan HGB, Pemerintah Dorong Pemerataan Pemanfaatan.” *Setkab.Go.Id*, 2022. <https://setkab.go.id/cabut-ribuan-iup-hgu-dan-hgb-pemerintah-dorong-pemerataan-pemanfaatan/>.

Bisdan Sigalingging. “Kepastian Hukum,” n.d. <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastian-hukum.html?zx=42939821ea19f042>.

Chandra Gian Asmara. “Breaking News! Jokowi Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan.” *CNBC INDONESIA*, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106131609-4-305137/breaking-news-jokowi-cabut-2078-izin-usaha-pertambangan>.

CNN Indonesia. “Bahlil Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan Tak Produktif.” *CNN Indonesia.Com*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220926154709-92-852816/bahlil-cabut-2078-izin-usaha-pertambangan-tak-produktif>.

Kompas. “Bahlil: Konyol, Sebagian Izin Usaha Pertambangan Digadaikan Di Bank.” *Money.Kompas.Com*, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/08/12/193000026/bahlil--konyol-sebagian-izin-usaha-pertambangan-digadaikan-di-bank>.

Nafiatul Munawaroh. “Mengenal Politik Hukum Di Indonesia Dan Contohnya.” *Hukumonline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea>.